

**ANALISIS PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PERKAPITA DI
KABUPATEN BATANGHARI**

Oleh : Nurhayani.,SE.MSi

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi,
Kampus Pinang Masak

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan dan pengeluaran perkapita di Kabupaten Batanghari Hasil penelitian menunjukkan Rata – rata pendapatan perkapita mengalami peningkatan sebesar 4.35 persen setiap tahunnya. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan pendapatan perkapita selama tahun 2005 – 2009, Kabupaten Batang Hari menempati urutan ke delapan dari 10 kabupaten/kota di provinsi Jambi. Selama tahun 2005 – 2009 pertumbuhan perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 2.92 persen dari tahun sebelumnya, untuk tahun – tahun yang lain pertumbuhan perkapita Batang Hari berkisar 3 – 4 persen setiap tahunnya. Untuk Kabupaten Batang Hari rata – rata pengeluaran perkapita rill penduduk selama tahun tahun 2005 – 2009 terus mengalami peningkatan, Pengeluaran perkapita di Kabupaten Batang Hari terbesar berada pada golongan pengeluaran Rp. 300.000 – Rp. 499.999 sebesar 45.65 persen dengan didominasi untuk pengeluaran makanan, terjadi pergeseran pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran non makanan seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Kata Kunci : Pendapatan, Pengeluaran Perkapita

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang masih berada dalam tahap awal pelaksanaan proses pembangunan. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran rendah yang merupakan areal tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar disektor perkebunan dan pertambangan adalah Kabupaten Batang Hari. Kelapa sawit dan karet yang merupakan tanaman perkebunan utama di daerah provinsi Jambi banyak berasal dari daerah ini, ditambah lagi dengan gas bumi yang sebagian besar berada didaerah ini. Tidaklah mengherankan jika pertumbuhan ekonomi Batang Hari yang di dominasi sektor pertanian cukup tinggi sebesar 5.84 persen pada tahun 2005 dan 6.24 persen pada tahun 2008. Sama halnya dengan Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, tidak diikuti dengan pendapatan perkapita masyarakat yang baik, pada tahun 2006 pendapatan perkapita masyarakat di kabupaten Batang Hari sebesar Rp. 3.686.618, sehingga jumlah penduduk miskin di kabupaten ini relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah non pemekaran lainnya (BPS, 1997 dan 2001).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori perkembangan pengeluaran pemerintah

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "The Law of Expanding State Expenditure". Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat.

Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organisme mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi (PDB)

menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Satu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut

Menurut Guritno (1991), perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Perubahan permintaan akan barang publik
- b. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi factor produksi yang digunakan dalam proses produksi
- c. Perubahan kualitas barang
- d. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi

III. METODE PENELITIAN

Analisis data informasi yang dikumpulkan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor yang ada dilapangan yang berdasarkan pada teori-teori, konsep-konsep yang ada dalam literatur relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Untuk melihat perkembangan pendapatan perkapita digunakan alat analisis dengan rumus sebagai berikut:

$$PP = \frac{PP_t - PP_{(t-1)}}{PP_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

PP = Pendapatan perkapita,

PP_t = Pendapatan perkapita pada tahun tertentu

PP_(t-1) = Pendapatan perkapita pada tahun sebelumnya

Untuk melihat perkembangan daya beli masyarakat digunakan alat analisis dengan rumus sebagai berikut:

$$Ei = \frac{E_t - E_{(t-1)}}{E_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

E = Pengeluaran perkapita

E_t = Pengeluaran perkapita pada tahun tertentu

E_(t-1) = Pengeluaran perkapita pada tahun sebelumnya

IV. HASIL PENELITIAN

Selain pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat melalui kemakmuran masyarakat setempat yang tercermin dari pendapatan per kapita penduduk. Berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Bank Dunia, Indonesia pada tahun 2009 tergolong kepada kelompok negara berpendapatan menengah yang memiliki PNB perkapita antara US\$ 1.741 sampai dengan US\$ 2.990, sedangkan pendapatan Indonesia pada tahun tersebut sebesar US\$ 2.030. Provinsi Jambi, dari 10 kabupaten/kota hanya tanjung jabung timur yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi, sementara daerah lainnya memiliki pendapatan perkapita rata-rata sebesar 4 juta rupiah

Tabel 1 PDRB perkapita Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2009 (Jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009
Kerinci	4,121	4,334	4,565	3,227	4,533
Merangin	3,113	3,215	3,387	3,532	3,758
Sarolangun	4,226	4,443	4,689	4,916	5,126
Batang Hari	4,374	4,502	4,674	4,879	5,045
Muaro Jambi	3,221	3,250	3,285	3,409	3,552
Tanjatim	9,032	9,445	9,777	10,215	10,626
Tanjabbar	6,991	7,284	7,636	7,969	8,305
Tebo	2,750	2,957	3,082	3,227	3,337
Bungo	3,524	3,706	3,937	4,294	4,447
Kota Jambi	5,736	5,989	6,184	6,461	6,754
Provinsi Jambi	4,805	4,980	5,205	5,486	5,741

Sumber: Jambi dalam Angka beberapa tahun terbitan

V.KESIMPULAN

1. Rata – rata pendapatan perkapita mengalami peningkatan sebesar 4.35 persen setiap tahunnya. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan pendapatan perkapita selama tahun 2005 – 2009, Kabupaten Batang Hari menempati urutan ke delapan dari 10 kabupaten/kota di provinsi Jambi. Selama tahun 2005 – 2009 pertumbuhan perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 2.92 persen dari tahun sebelumnya, untuk tahun – tahun yang lain pertumbuhan perkapita Batang Hari berkisar 3 – 4 persen setiap tahunnya.

2. Untuk Kabupaten Batang Hari rata – rata pengeluaran perkapita riil penduduk selama tahun tahun 2005 – 2009 terus mengalami peningkatan, Pengeluaran perkapita di Kabupaten Batang Hari terbesar berada pada golongan pengeluaran Rp. 300.000 – Rp. 499.999 sebesar 45.65 persen dengan didominasi untuk pengeluaran makanan, terjadi pergeseran pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran non makanan seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, “*Batang Hari Dalam Angka*”
berbagai tahun terbitan,
Bappeda Kabupaten
Batang Hari dan BPS
Kabupaten Batang Hari.
- Guritno, 1991, “*teori ekonomi
makro*”, STIE YKPN,
Yogyakarta.
- Musgrave, 1980, “*Keuangan Negara
dalam Teori dan
Praktek*”, Erlangga,
Jakarta.